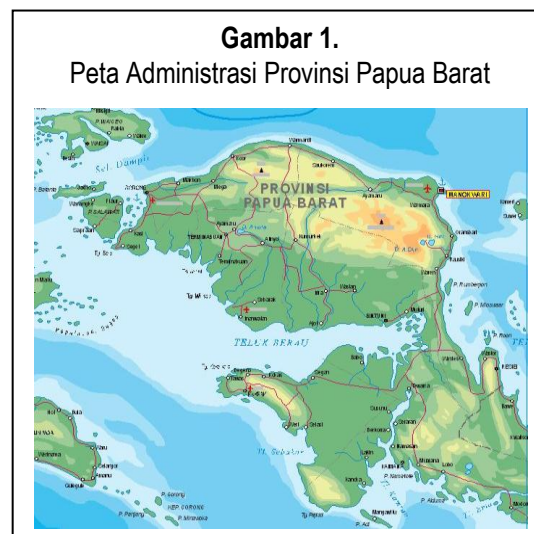


PROFIL PEMBANGUNAN PAPUA BARAT

A. GEOGRAFIS DAN ADMINISTRASI WILAYAH

Secara geografis, wilayah Provinsi Irian Jaya Barat terletak dibawah katulistiwa, antara 00 25' – 40 18' Lintang Selatan dan 1240 0'-1320 0' Bujur Timur dengan batas – batas administratif wilayah Sebelah Utara : Samudera Pasifik, Sebelah Barat : Laut Seram Provinsi Maluku, Sebelah Selatan : Laut Banda Provinsi Maluku, Sebelah Timur : Provinsi Papua

Berdasarkan administrasi wilayah, Provinsi Irian Jaya Barat terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota. Luas wilayah Provinsi Irian Jaya Barat adalah 115.363,50 km², dimana Kabupaten Teluk Bintuni merupakan daerah yang terluas yaitu 18.658 km², sedangkan Kota Sorong merupakan daerah dengan luas terkecil, yaitu 1.105 km²



B. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN

B1. Kependudukan

Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Papua Barat tahun 2011 sebanyak 789.013 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 8 jiwa per km². Penyebaran penduduk di Provinsi Papua Barat masih bertumpu di Kota Sorong yakni sebesar 25,3 persen dan Kabupaten Manokwari sebesar 24,7 persen sedangkan kabupaten yang lainnya dibawah 10 persen. Sementara dilihat dari kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Sorong yakni sebanyak 304 jiwa per Km² dan yang paling rendah adalah Kabupaten Tambrau dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 1 jiwa per Km². Dilihat dari sisi laju pertumbuhan selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) Provinsi Papua Barat sebesar 3,69 persen lebih tinggi dari pertumbuhan nasional penduduk nasional (1,49%). Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota tertinggi terdapat di Kota Sorong 4,75 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Sorongsebesar minus 1,10persen.

Tabel 1:

Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2011

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah*) KM ²	Jumlah		Kepadatan Penduduk	
		Penduduk	Rumah Tangga	per KM ²	per Rumah Tangga
01. Fakfak	11.036,48	68.503	15.937	6,21	4,30
02. Kaimana	16.241,84	48.251	11.852	2,97	4,07
03. Teluk Wondama	3.959,53	27.233	6.228	6,88	4,37
04. Teluk Bintuni	20.840,83	54.194	13.228	2,60	4,10
05. Manokwari	14.250,94	194.948	46.678	13,68	4,18
06. Sorong Selatan	3.946,94	39.297	8.055	9,96	4,88
07. Sorong	7.415,29	73.088	17.811	9,86	4,10
08. Raja Ampat	8.034,44	43.435	10.111	5,41	4,30
09. Tambrau	5.179,65	6.147	1.356	1,19	4,53
10. Maybrat	5.461,69	34.287	8.400	6,28	4,08
71. Sorong	656,64	199.630	45.501	304,02	4,39
PAPUA BARAT	97.024,27	789.013	185.156	8,13	4,26

Sumber: Provinsi Dalam Angka tahun 2012

B2. Ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk bekerja, dan jumlah pengangguran terbuka. Perkembangan penduduk usia kerja, penduduk bekerja secara absolute menunjukkan peningkatan. Namun jumlah pengangguran terbuka cenderung meningkat.

Penduduk Usia Kerja, Perkembangan jumlah penduduk usia kerja dalam lima tahun terakhir meningkat, jumlah penduduk usia kerja tahun 2012 mencapai 538.709 jiwa lebih besar dari tahun 2008, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 361.597 jiwa dan bukan angkatan kerja 177.112 jiwa. Penyebaran penduduk usia kerja paling banyak terdapat di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong yaitu masing-masing sebanyak 136.471 jiwa dan 136.866 jiwa.

Tabel 2:
Perkembangan Penduduk Usia Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat
Tahun 2008 dan 2012.

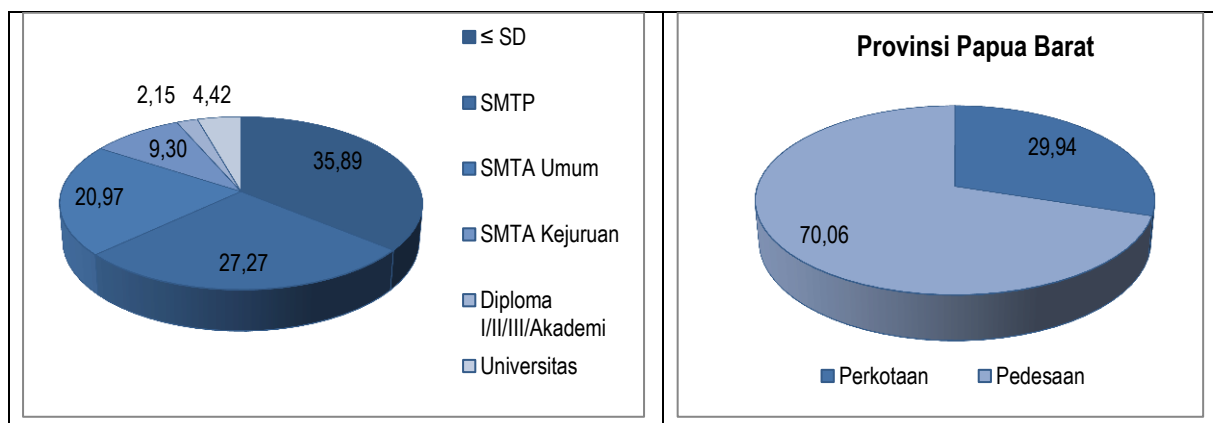
Kabupaten/Kota	Penduduk Usia Kerja					
	2008			2012		
	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah
Fak-Fak	22.549	18.179	40.728	30.715	16.300	47.015
Kaimana	17.355	10.987	28.342	23.971	7.554	31.525
Teluk Wondama	12.293	4.856	17.149	12.306	5.253	17.559
Teluk Bintuni	27.089	8.702	35.791	25.921	11.130	37.051
Manokwari	97.626	23.164	120.790	101.017	35.454	136.471
Sorong Selatan	28.652	13.160	41.812	18.278	6.851	25.129
Sorong	48.310	22.118	70.428	30.067	17.984	48.051
Raja Ampat	17.696	13.148	30.844	18.801	10.302	29.103
Tambrau	0	0	0	3.269	673	3.942
Maybrat	0	0	0	16.504	9.493	25.997
Kota Sorong	70.812	45.704	116.516	80.748	56.118	136.866

Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

Penduduk usia kerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, meskipun memiliki potensi penduduk usia produktif yang besar, namun sebagian besar masih merupakan tamatan pendidikan dasar mencapai 35,89 persen, dan menengah (SMP dan SMA) mencapai sekitar lebih dari 50 persen. Sementara untuk tamatan pendidikan tinggi (universitas dan akademi) tidak sampai 10 persen dari total penduduk usia kerja. Sementara berdasarkan tipe daerah, sebagian besar penduduk usia kerja terdapat di perdesaan, yaitu sekitar 70,06 persen.

Gambar 2:

Distribusi Penduduk Usia Kerja menurut Pendidikan dan Tipe Daerah di Provinsi Papua Barat Tahun 2012



Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

Angkatan Kerja. Perkembangan angkatan kerja Provinsi Papua Barat dalam 5 tahun terakhir meningkat. Jumlah angkatan kerja tahun 2013 (februari) 375.230 jiwa atau sekitar 0,31 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 358.430 jiwa penduduk bekerja dan 16.800 jiwa pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja terbesar tahun 2012 terdapat di Kabupaten Manokwari, yaitu sebanyak 101.017 jiwa, dan paling rendah di Kabupaten Tambrau sebanyak 3.269 jiwa.

Tabel 3:

Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2008 dan 2012

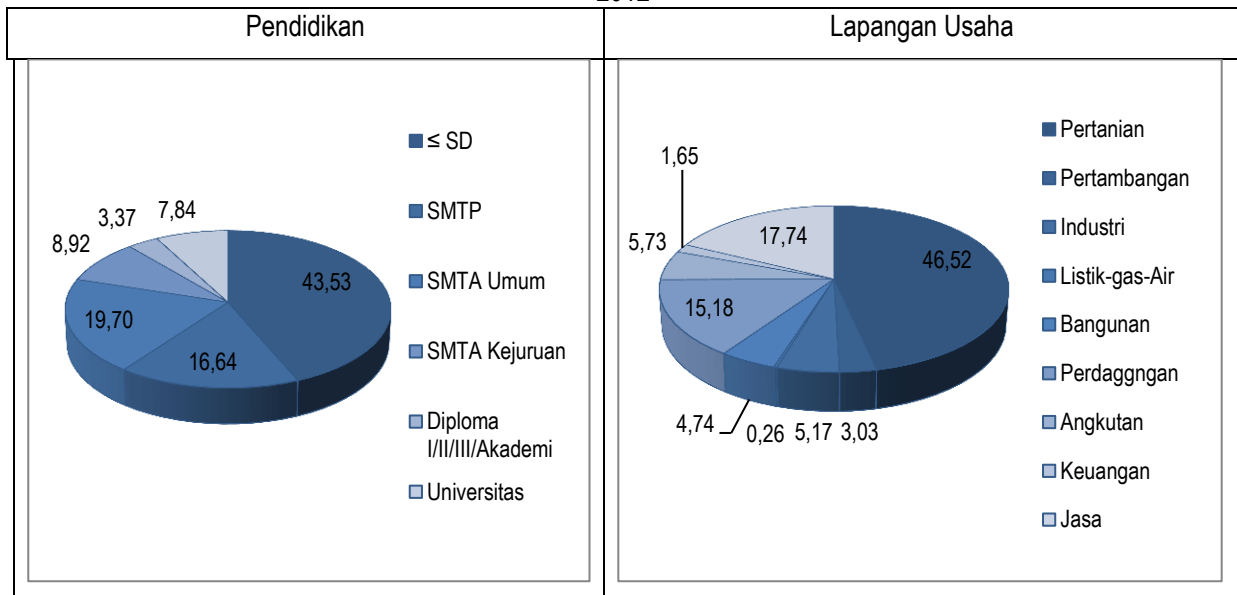
Kabupaten/Kota	Angkatan Kerja			
	2008		2012	
	Penduduk Bekerja	Pengangguran Terbuka	Penduduk Bekerja	Pengangguran Terbuka
Kabupaten Fak-Fak	19.468	3.081	27.971	2.744
Kabupaten Kaimana	16.025	1.330	23.239	732
Kabupaten Teluk Wondama	11.344	949	11.839	467
Kabupaten Teluk Bintuni	24.971	2.118	24.339	1.582
Kabupaten Manokwari	93.999	3.627	98.758	2.259
Kabupaten Sorong Selatan	27.744	908	17.572	706
Kabupaten Sorong	45.897	2.413	29.686	381
Kabupaten Raja Ampat	17.171	525	17.766	1.035
Kabupaten Tambrau	0	0	3.233	36
Kabupaten Maybrat	0	0	15.789	715
Kota Sorong	59.574	11.238	71.549	9.199

Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

Penduduk Bekerja. Jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 (februari) mencapai 358.430 jiwa atau meningkat sebanyak 42.234 jiwa dari tahun 2008. Persebaran penduduk bekerja sebagian besar tersedia di pedesaan dibandingkan di perkotaan, dan sebagian besar penduduk bekerja masih bergantung pendapatannya di sektor pertanian (46,52%) dan sektor jasa (17,74%). Sementara dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja merupakan tamatan sekolah dasar dan menengah. Jumlah penduduk bekerja antar kabupaten/kota terbesar terdapat di Kabupaten Manokwari mencapai 98.758 jiwa

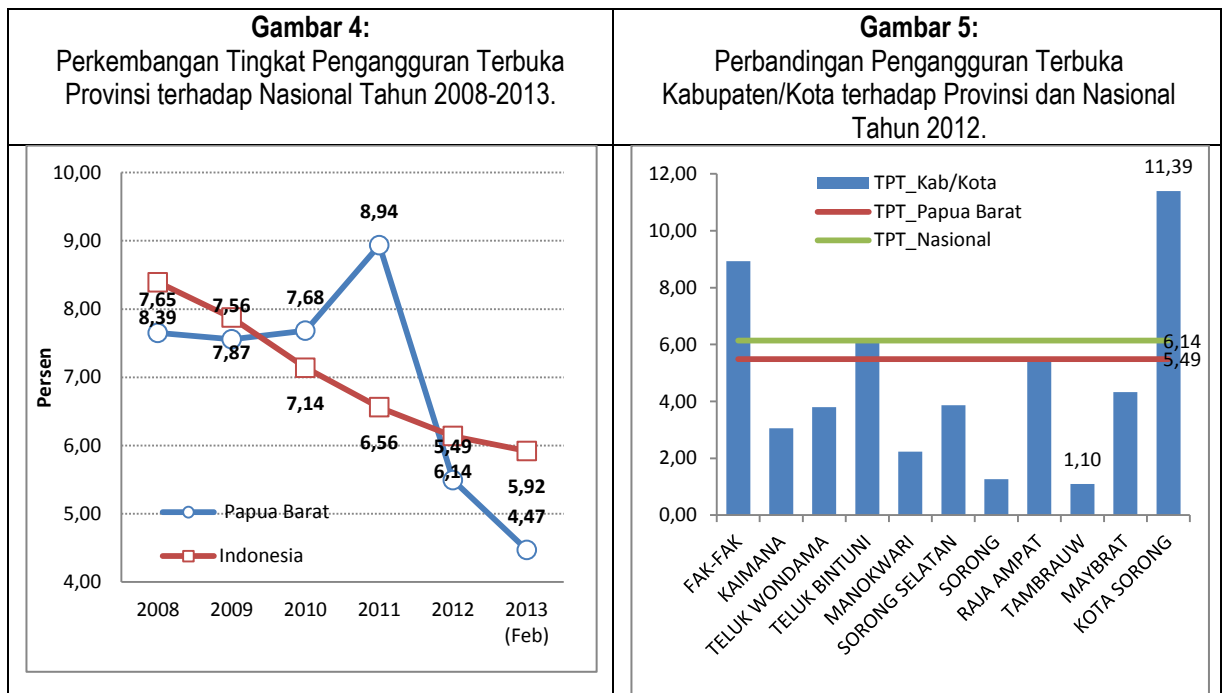
Gambar 3:

Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan dan Lapangan Usaha di Provinsi Papua Barat Tahun 2012



Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

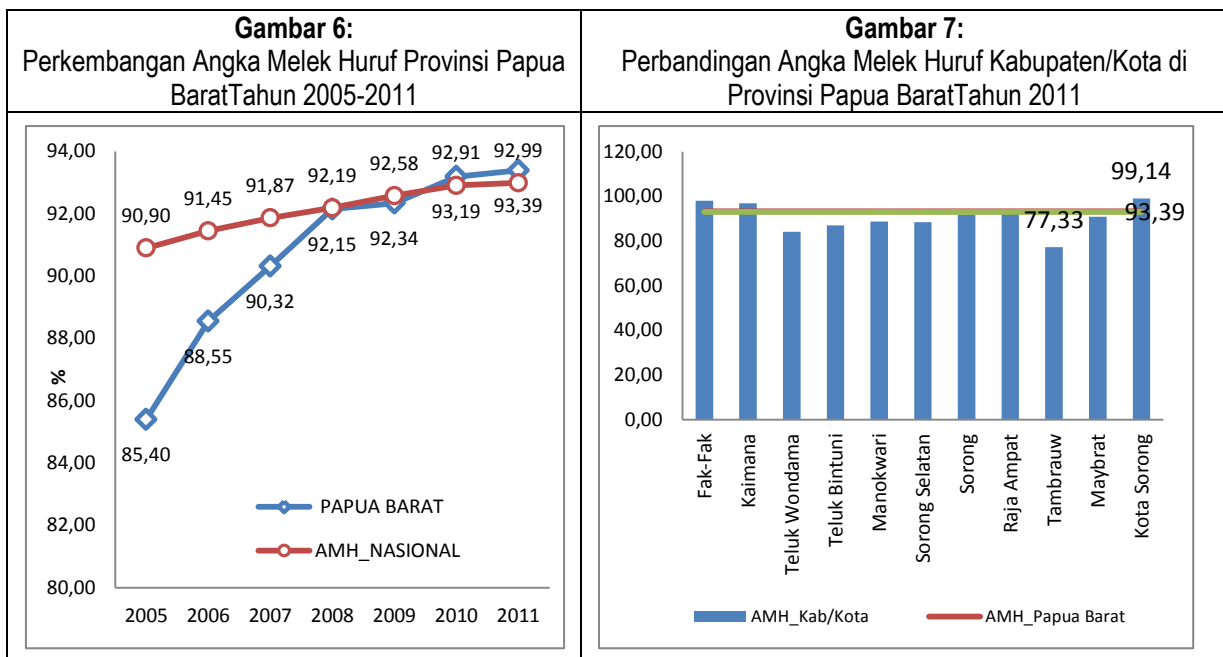
Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Barat pada tahun 2013 (februari) mencapai 16.800 jiwa menurun sebanyak 9.389 jiwa dari tahun 2008. Sementara untuk perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2013 (februari) sebesar 4,47 persen, atau menurun sebesar 3,18 persen dari TPT tahun 2008. Tingkat pengangguran Papua Barat masih tergolong rendah jika dibandingkan terhadap TPT nasional. Sementara untuk TPT tahun 2012 tertinggi di Kota Sorong yaitu sebesar 11,39 persen dan TPT terendah di Kabupaten Tambrauw (1,10 %).



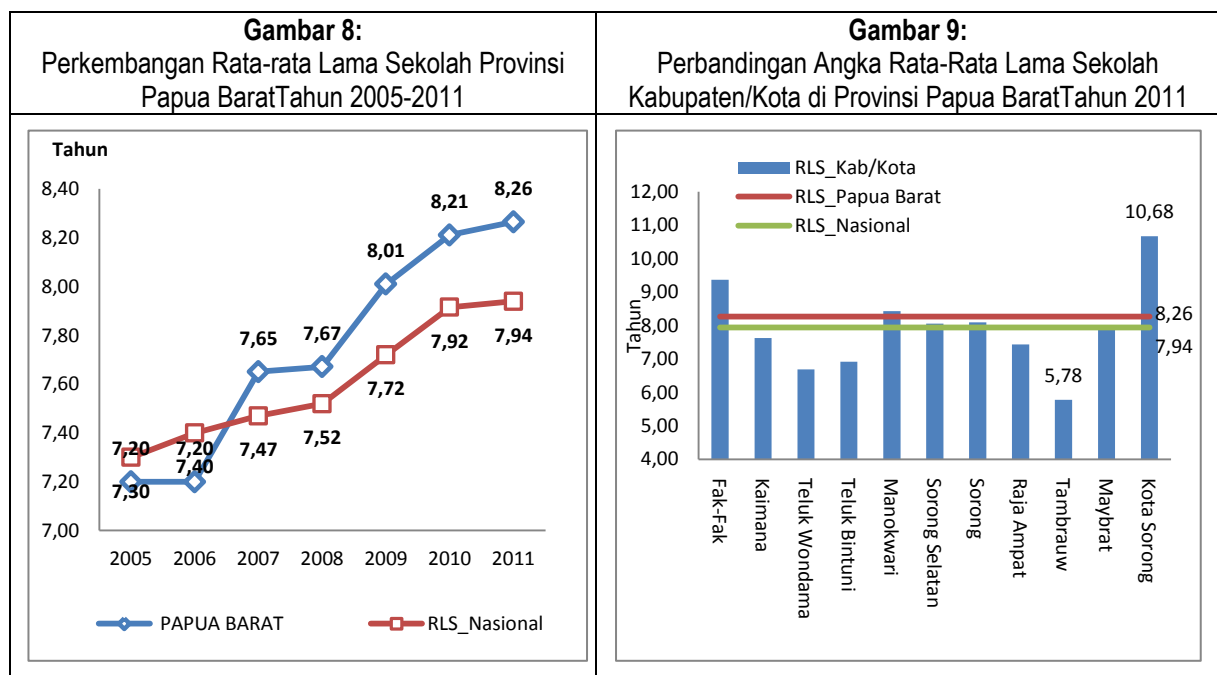
Sumber : Sakernas (Agustus), BPS 2012

B3. Kondisi Pendidikan

Perkembangan kondisi pendidikan menurut indikator Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Papua Barat menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). Pada tahun 2011 Rata-rata Lama Sekolah mencapai 8,90 tahun dan Angka Melek Huruf mencapai 93,39% berada diatas rata-rata nasional. Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota, RLS tertinggi terdapat di Kota Sorong (11,39 tahun) dan terendah Kabupaten Tambrauw (5,78 tahun). Sementara untuk AMH mencapai 93,39 persen lebih tinggi dari AMH nasional (92,99%), dengan AMH tertinggi di Kota Sorong (99,14%) dan terendah di Kabupaten Tambrauw (77,33%).



Sumber: BPS 2010



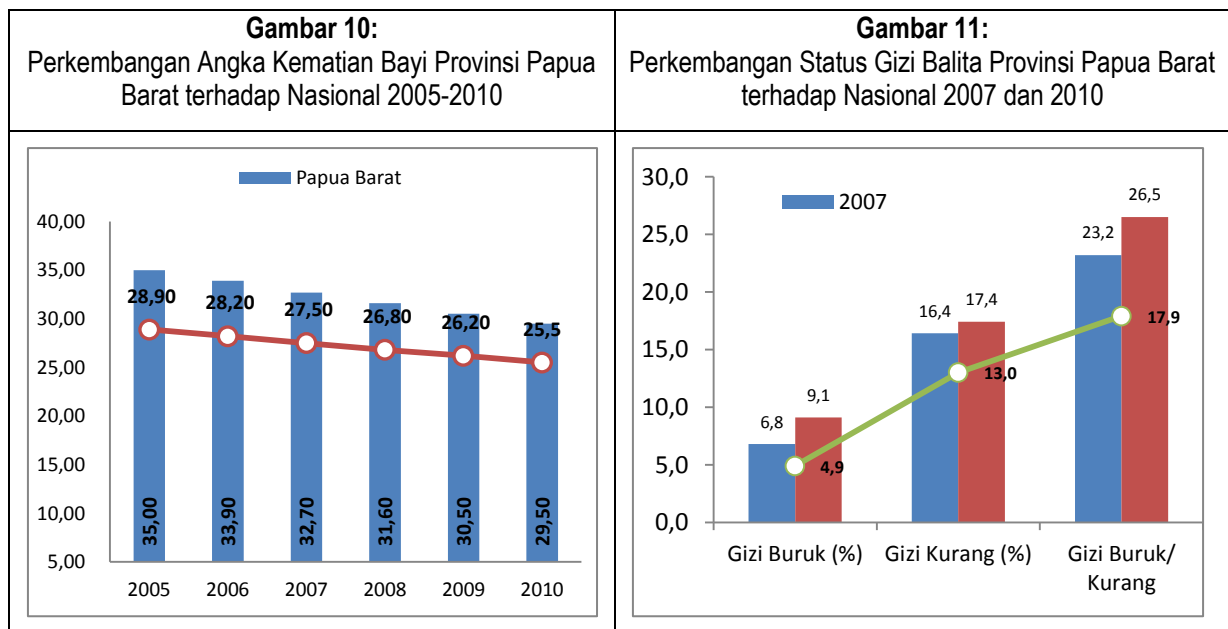
Sumber: BPS, Tahun 2011

B4. Kesehatan

Perkembangan derajat kesehatan penduduk antarprovinsi di wilayah Papua Barat selama periode terakhir menunjukkan kondisi perbaikan, yang diindikasikan oleh menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), dan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH). Kondisi ini sejalan dengan perkembangan perbaikan kondisi kesehatan secara nasional yang cenderung terus membaik.

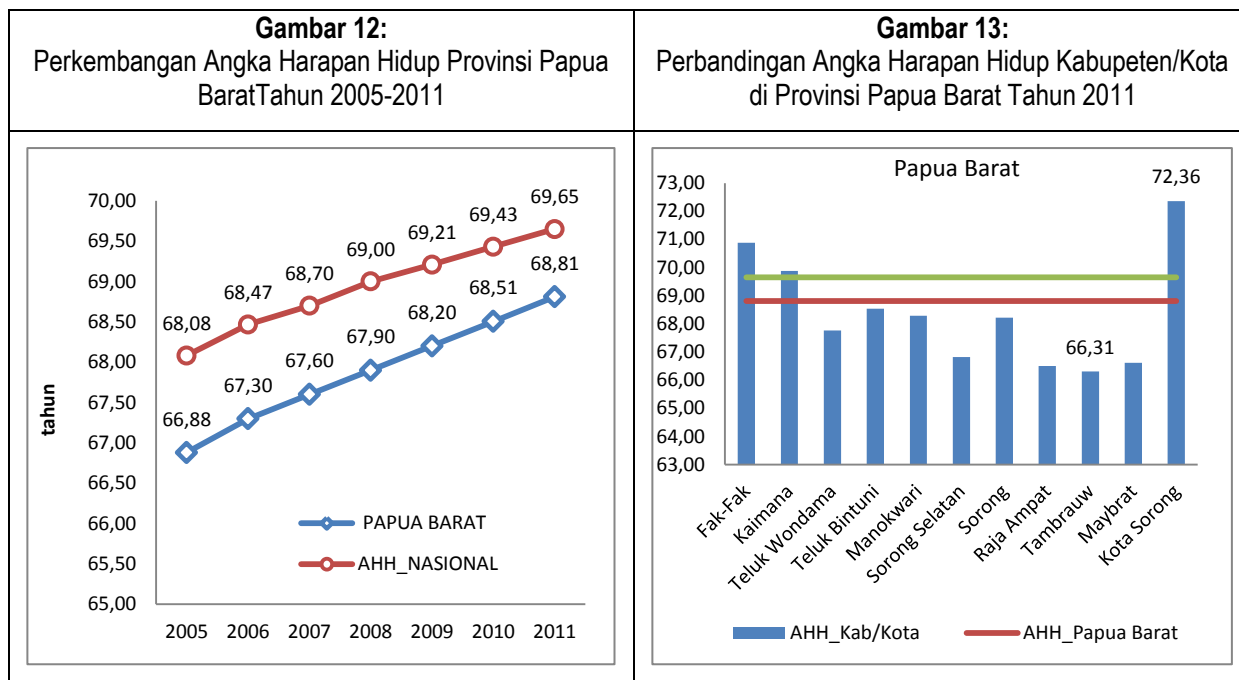
Angka Kematian Balita (AKB), Menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), kondisi AKB menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2010), AKB tahun 2010 sebesar 29,5 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi AKB Provinsi Papua Barat masih tergolong tinggi dan berada di atas rata-rata AKB nasional.

Status Gizi Balita, Kondisi kesehatan masyarakat berdasarkan indikator status gizi balita, merupakan gangguan pertumbuhan bayi yang terjadi sejak usia dini (4 bulan) yang ditandai dengan rendahnya berat badan dan tinggi badan, dan terus berlanjut sampai usia balita. Hal tersebut terutama disebabkan rendahnya status gizi ibu hamil. Perkembangan status gizi balita untuk persentase balita gizi buruk/kurang meningkat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2007, namun masih tinggi dibandingkan nasional.



Sumber: BPS, Tahun 2011

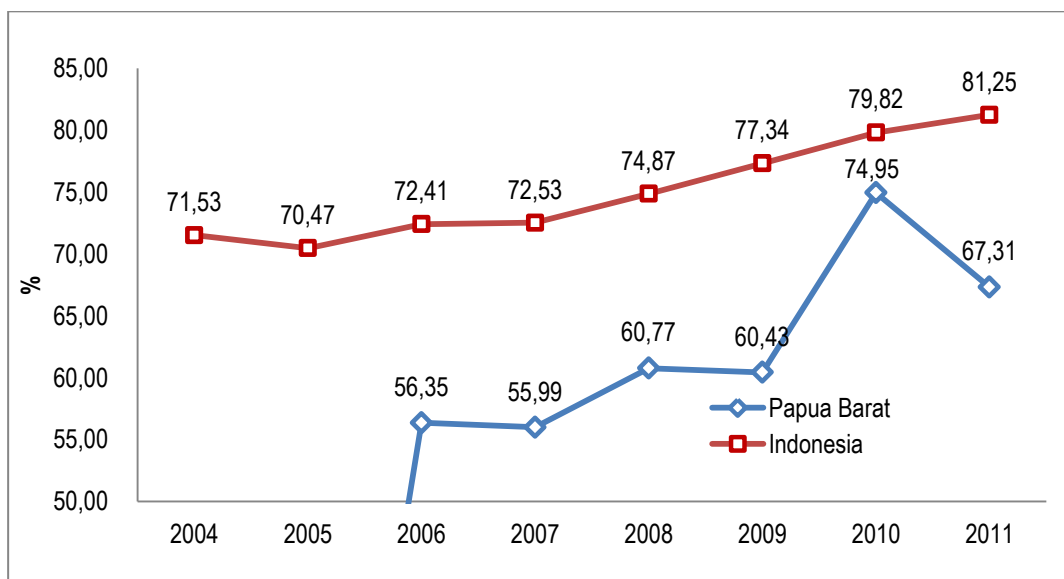
Angka Harapan Hidup (AHH), perkembangan AHH Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan AHH secara nasional. AHH Provinsi Papua Barat tahun 2011 mencapai 68,81 tahun masih lebih rendah dibandingkan terhadap AHH nasional. Sementara untuk perbandingan AHH antar kabupaten/kota taun 2011 di Provinsi Papua Barat, AHH tertinggi berada di Kota Sorong 72,36 tahun lebih tinggi dari AHH provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Tambauw (66,31 tahun).



Sumber: BPS, Tahun 2011

Indikator kesehatan lainnya yang menggambarkan kinerja dari pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi yang berkaitan dengan proses melahirkan. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui data persentase kelahiran balita menurut penolong kelahiran terakhir. Perkembangan dari persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis dalam lima tahun terakhir di Provinsi Papua Barat terus meningkat, namun masih rendah dibandingkan angka rata-rata nasional.

Gambar 14:
Perkembangan Persentase Kelahiran Balita Ditolong Tenaga Menis terhadap Nasional Tahun 2004-2011



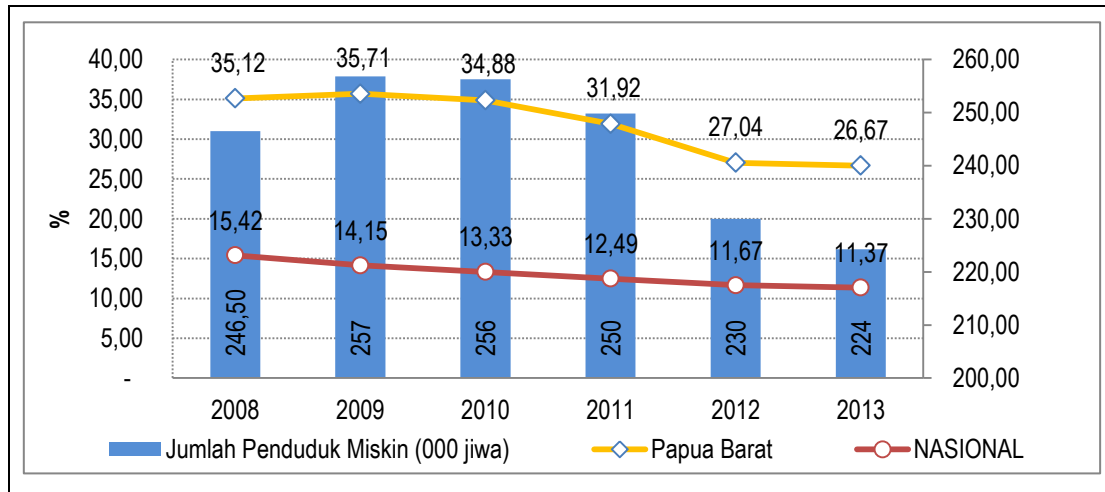
Sumber: BPS, Tahun 2011

B5. Kondisi Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun 22,23 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) 224 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan, dan hingga akhir tahun 2013 mencapai 26,67 persen atau menurun sebesar 8,45 persen dari tahun 2008. Kondisi kemiskinan Provinsi Papua Barat masih tergolong tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).

Gambar 15:

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Barat Tahun 2008-2013



Sumber: BPS, Tahun 2012

Penyebaran penduduk miskin terbesar tahun 2011 terdapat di Kabupaten Manokwari yaitu sebanyak 66,70 ribu jiwa dan terendah di Tambora sebesar 2,80 ribu jiwa. Sementara untuk penyebaran tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Teluk Bintuni sebesar 47,44%, dan tingkat kemiskinan terendah di Kota Sorong sebesar 14,04%.

Tabel 4:

Perkembangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2006-2011

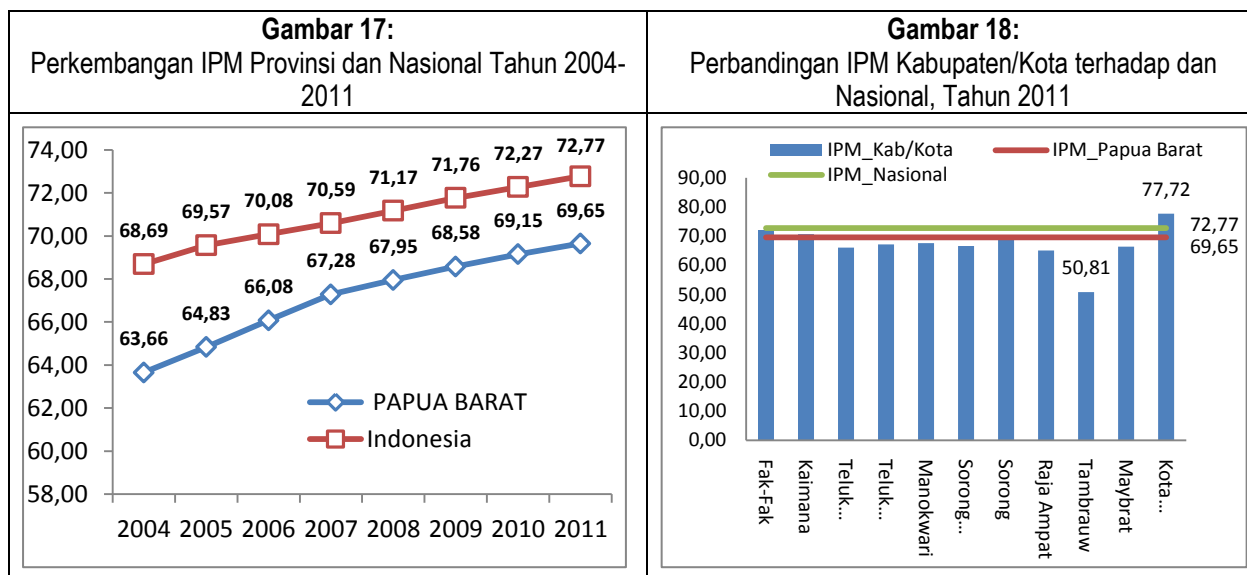
kabupaten/kota	Penduduk Miskin (000)			Presentase Kemiskinan (%)		
	2006	2011	Δ 2006-2011	2006	2011	Δ 2006-2011
Fak-Fak	26,4	23,20	3,20	41,64	33,18	8,46
Kaimana	14,7	10,10	4,60	36,85	20,84	16,01
Teluk Wondana	11,9	12,10	-0,20	54,95	43,86	11,09
Teluk Bintuni	27,5	26,00	1,50	53,75	47,44	6,31
Manokwari	81,2	66,70	14,50	49,75	33,95	15,80
Sorong Selatan	17,1	9,10	8,00	29,46	22,93	6,53
Sorong	33,1	24,70	8,40	35,52	33,38	2,14
Raja Ampat	12,2	10,50	1,70	31,25	23,50	7,75
Tambora		2,80	-2,80		43,77	-43,77
Maybrat		13,90	-13,90		40,16	-40,16
Kota Sorong	60,0	28,00	32,00	37,62	14,04	23,58
PAPUA BARAT	284,1	227,10	57,00	41,34	28,53	12,81

Keterangan: *) data kemiskinan Kabupaten/Kota 2011 belum tersedia

Sumber : BPS, Tahun 2011

B6. Perkembangan IPM

Perkembangan IPM Provinsi Papua Barat dalam kurun waktu 2004-2011 semakin membaik, IPM Provinsi Papua Barat tahun 2011 mencapai 69,65 masih rendah dibandingkan rata-rata IPM nasional (72,77), dengan ranking IPM Provinsi Papua Barat tahun 2011 menduduki peringkat ke 29 secara nasional setelah Kalimantan Barat. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota tahun 2011, IPM tertinggi adalah Kota Sorong(77,72) dan menduduki peringkat ke-30 secara nasional, dan IPM terendah adalah Kabupaten Tambora yaitu 50,81 dan berada di peringkat ke-486 secara nasional.



Sumber: BPS Tahun 2011

C. PEREKONOMIAN DAERAH

C1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

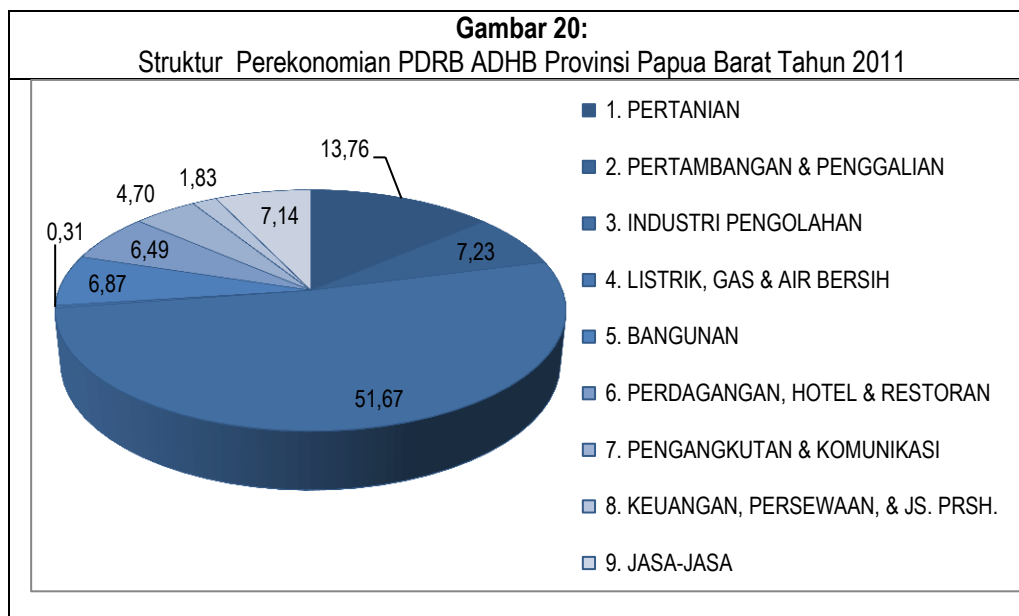
PDRB Provinsi Papua Barat menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas tahun 2012 mencapai 42.760 miliar rupiah lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB ADHB dengan migas Provinsi Papua Barat menyumbang sebesar 0,64 persen terhadap PDB nasional (33 provinsi). Sementara untuk PDRB ADHK tahun 2000 dengan migas sebesar 13.781 miliar rupiah, sementara tanpa migas sebesar 6.997 miliar rupiah

Tabel :

Perkembangan PDRB menurut ADHB dan ADHK Provinsi Papua Barat, Tahun 2008-2012. Miliar Rupiah

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2008	13.975	9.779	6.400	4.988
2009	18.144	12.124	7.287	5.447
2010	26.873	14.057	9.361	5.911
2011	36.179	16.576	11.896	6.514
2012	42.760	18.779	13.781	6.997

Struktur perekonomian Provinsi Papua Barat 2011, didominasi bersama kontribusi dari sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 26,45%, sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 51,67 %, sektor pertanian (13,76%), dan pertambangan dan penggalian (7,23%). Selain ketiga sektor diatas, sektor lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan (11,87%), dan sektor bangunan (7,14%)



Sumber: BPS tahun 2011

Jika dilihat perbandingan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan migas 2011 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi, dimana PDRB tertinggi mencapai 15.118 miliar rupiah (Kabupaten Teluk Bintuni) dan PDRB terendah sebesar 46 miliar rupiah (Kabupaten Tambraum).

Tabel 5:
Perbandingan Nilai PDRB ADHB Kabupaten/Kota di Papua Barat
Tahun 2011. (Rp. miliar)

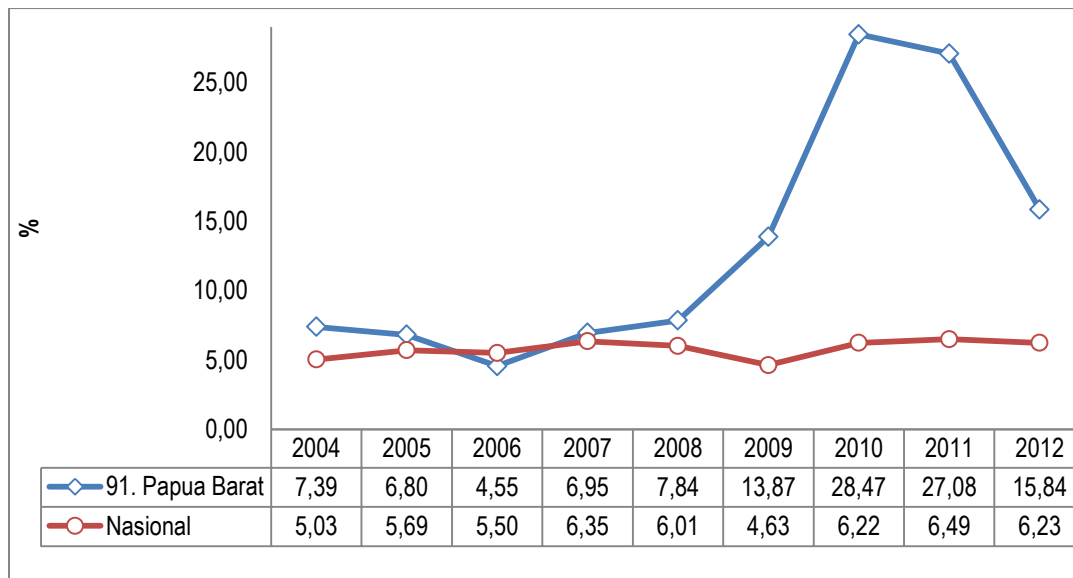
KABUPATEN/KOTA	2007	2008	2009	2010*	2011**
Fak-Fak	912	1,115	1,283	1,508	1,724
Kaimana	534	653	760	889	996
Teluk Wondama	209	298	363	394	464
Teluk Bintuni	719	912	1,952	8,675	15,118
Manokwari	1,673	2,176	2,561	2,947	3,338
Sorong Selatan	327	433	338	393	464
Maybrat #	-	-	161	187	213
Sorong	3,346	4,745	5,745	6,166	6,839
Tambraum #	-	-	35	40	46
Raja Ampat	796	938	1,057	1,121	1,196
Kota Sorong	1,869	2,400	2,728	3,199	3,646

#) Merupakan Pecahan dari kabupaten yang berada di atasnya

* Angka sementara; ** Angka sangat sementara

Perkembangan ekonomi Papua Barat dalam tiga tahun terakhir mengalami perlambatan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 15,84% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh sektor tumbuh positif pada tahun 2011, dengan laju pertumbuhan tertinggi dan sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi Papua Barat adalah: sektor jasa (23,60%), sektor bangunan (12,24%), dan sektor perdagangan (12,97%).

Gambar 21:
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat terhadap Nasional Tahun 2004-2012, (%)



Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota rata-rata tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2011, adalah Kabupaten Teluk Bintuni dengan laju pertumbuhan sebesar 73,01%, dan pertumbuhan ekonomi terendah Kabupaten Raja Ampat sebesar 3,70%.

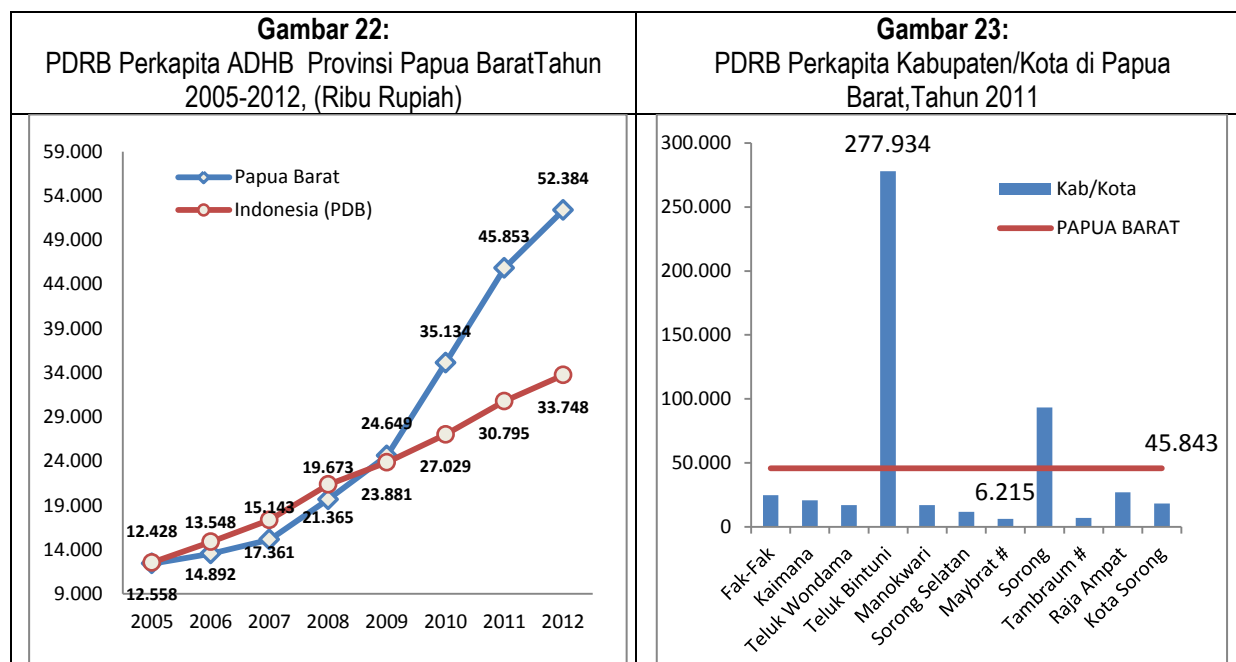
Tabel 6:
Laju Pertumbuhan PDRB dengan Migas ADHK 2000 Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2011 (persen)

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010*	2011**
Kab. Fak-Fak	6.85	6.98	6.91	7.84	8.15
Kab. Kaimana	8.38	7.55	9.56	9.94	7.72
Kab. Teluk Wondama	19.75	18.25	9.80	4.22	10.64
Kab. Teluk Bintuni	9.85	12.30	82.04	171.77	73.01
Kab. Manokwari	8.61	10.20	10.09	10.07	9.12
Kab. Sorong Selatan	8.67	7.95	7.39	6.19	7.83
Kab. Maybrat #	-	-	-	7.54	6.27
Kab. Sorong	3.13	6.01	4.59	2.94	6.50
Kab. Tambera #	-	-	-	5.26	5.37
Kab. Raja Ampat	2.36	-1.23	1.90	2.49	3.70
Kota Sorong	6.57	8.02	8.78	7.69	8.20
PAPUA BARAT	6.95	7.84	13.87	28.34	27.22

Sumber: BPS, 2011

Keterangan: *) angka sementara; **) angka sangat sementara; # kabupaten pemekaran

PDRB perkapita dengan migas ADHB Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota dari tahun 2005-2012 meningkat setiap tahunnya, PDRB perkapita tahun 2012 Papua Barat mencapai sebesar 52.384 ribu/jiwa lebih tinggi dari PDRB perkapita nasional (33.748 ribu/jiwa). Sementara untuk perbandingan PDRB perkapita kabupaten/kota di Papua Barat kecenderungan adanya kesenjangan yang cukup tinggi, dimana sebagian besar kabupaten/kota memiliki PDRB perkapita dibawah rata-rata PDRB perkapita provinsi, dengan PDRB perkapita tertinggi mencapai 277.934 ribu/jiwa terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni dan terendah sebesar 6.215 ribu/jiwa di Kabupaten Maybrat.



D2. Investasi PMA dan PMDN

Perkembangan realisasi nilai investasi PMA Provinsi Papua Barat dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) cenderung meningkat, dengan nilai investasi PMA tahun 2012 tercatat sekitar 32,04 juta US\$ dengan jumlah proyek sebanyak 18 proyek. Sementara untuk perkembangan nilai investasi PMDN cenderung menurun, nilai realisasi PMDN tahun 2012 tercatat sebesar 45,83 miliar rupiah dengan jumlah proyek sebanyak 5 proyek, namun lebih rendah dibandingkan nilai PMDN tahun 2011 yaitu sebesar 47,17 miliar rupiah.

Tabel 7:
Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2012.

Tahun	PMA		PMDN	
	Juta US\$	Proyek	Rp. Miliar	Proyek
2010	17.16	10	51.31	1
2011	33.09	25	47.17	5
2012	32.04	18	45.83	5

D. PRASARANA WILAYAH

E1. Jaringan Irigasi

Pembangunan jaringan irigasi merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan produksi pangan, serta dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Total luas jaringan irigasi di Papua Barat meliputi 20.356 hektar. Pengelolaan jaringan irigasi menurut kewenangan, 3.450 hektar kewenangan pusat, 12.285 hektar kewenangan provinsi, dan 4.621 hektar kewenangan kabupaten/kota.

E2. Infrastruktur Jalan

Kondisi panjang jalan berdasarkan status pembinaannya tahun 2011 di Provinsi Papua Barat mencapai 6.403,25 km, yang terdiri dari jalan Nasional sepanjang 799,89 km, jalan Provinsi sepanjang 875,22 km, dan Jalan Kabupaten/kota sepanjang 4.728,14 km. Untuk kondisi kualitas jalan menurut kriteria IRI (*International Roughness Index*), Departemen PU), kualitas jalan nasional tidak mantap di Provinsi Papua Barat pada tahun 2011 mencapai 194,84 km yang terdiri dari 4,81 persen kondisi jalan rusak ringan dan 15,42 persen dengan kondisi rusak berat. Sementara untuk kondisi jalan mantap sepanjang 768,40 km atau sekitar 79,77 persen kondisi jalan mantap di Papua Barat.

Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kepadatan jalan (*Road Density*), kepadatan jalan di Provinsi Papua Barat sebesar 0,05. Km/Km² lebih rendah dari kepadatan jalan tingkat nasional (0,23 Km/Km²). Sementara panjang jalan menurut kondisi permukaan jalan, jalan beraspal di Provinsi Papua Barat meliputi 46 persen dari total panjang jalan, dan sisanya 20 persen jalan kerikil, 34 persen jalan tanah dan lainnya.

Tabel 8.

Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km)

Provinsi	Negara	Provinsi	Kab / Kota	Jumlah
Papua Barat	799,89	875,22	4728,14	6403,25

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kab/Kota

Tabel 9.

Kondisi Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Papua Barat Tahun 2011 Berdasarkan Kerataan Permukaan Jalan (IRI) Status : Awal Agustus 2011

Panjang Kepmen PU (km)	Kondisi Permukaan Jalan (km)				Kondisi Kemantapan (km)			Kondisi Permukaan Jalan (%)				Kondisi Kemantapan (%)	
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Mantap	Tidak Mantap	
963,24	400,71	367,69	46,29	148,55	768,40	194,84	41,60	38,17	4,81	15,42	79,77	20,23	

Sumber: Subdit Informasi dan Komunikasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Kementerian PU

F. POTENSI SUMBERDAYA ALAM

F1. Sumber Daya Lahan

Pola penggunaan lahan di Provinsi Papua Barat di dominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Lahan pertanian yang digunakan di Provinsi Papua Barat diantaranya sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Sedangkan berdasarkan kawasan, hutan produksi yang dikonversi terbesar mencapai 23,69 %, hutan produksi tetap sebesar 19,10 %, hutan produksi terbatas 18,91 %, Hutan KSA/KPA 17,93 %, hutan lindung 16,87 % dan yang terkecil areal penggunaan lainya sebesar 3,5 %.

F2. Potensi Pertanian

Luas Panen Padi Sawah dan padi ladang Provinsi Papua Barat total luas panen pada tahun 2010 sebesar 9.464 Ha dengan total hasil produksi sebesar 43.256 Ton. Kondisi ini jauh menurun jika dibandingkan pada tahun 2009 dengan lahan 10.486 dengan total produksi sebesar 36.985 Ton. Jika dilihat dari luas panen Kabupaten/Kota terbesar di provinsi Papua Barat terbesar di Kabupaten Manokwari sebesar 5.931 Ha dengan hasil produksi 21.532 Ton. Sedangkan kabupaten penghasil produksi pertanian dengan luas panen terendah di Kabupaten Teluk Wondama 67 Ha dengan luas panen 207 Ton.

Disamping luas panen padi sawah dan ladang di Provinsi Papua Barat tahun 2010 teridentifikasi penghasil Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah, kedelai, kacang hijau. Produksi terbesar untuk Jagung terdapat di Kabupaten Manokwari dengan hasil 679 Ton, Ubi Kayu produksi terbesar di Kabupaten Sorong dengan hasil 3.208 Ton, Ubi Jalar produksi terbesar terdapat di Kabupaten Manokwari dengan hasil 3.135 Ha, kacang tanah produksi terbesar di kabupaten Manokwari dengan hasil 242 Ton, kedelai produksi terbesar di Kabupaten Manokwari sebesar 336 Ha dan Kacang hijau produksi terbesar di Kabupaten Sorong sebesar 92 Ton. Sehingga jika dilihat dari potensi pertanian dalam luas panen dan hasil produksi di Provinsi Papua Barat sebagian besar terdapat di Kabupaten Manokwari

F3. Potensi Perikanan

Produksi perikanan laut provinsi Papua Barat menurut jumlahnya pada tahun 2010 berjumlah 116.593,3 Ton. Produksi perikanan tertinggi terdapat di Kabupaten Manokwari sebesar 24.571,2 Ton dan terendah di Kabupaten Teluk Bintuni dengan produksi 2.160,8 Ton. Jika dilihat dari Kuartal I sampai IV Kabupaten Manokwari memiliki produksi perikanan laut tertinggi dan Kabupaten Teluk Bintuni memiliki nilai produksi terendah.

F4. Potensi Sumberdaya Mineral

Usaha pertambangan di Provinsi Papua Barat tahun 2010 di dominasi oleh hasil tambang berupa Minyak/Gas dan Nikel. Untuk penghasil Minyak/Gas terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Sorong sedangkan Nikel terdapat di Kabupaten Raja Ampat. Sedangkan untuk pembangkit tenaga Listrik PLN dilihat dari produksinya terbesar di Kabupaten Manokwari (128 juta KWH) dan terendah Kabupaten Tambrau (41 ribu KWH), sedangkan Kabupaten Teluk wondama dan Teluk bintuni sedang mengalami gangguan.